

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang, baik bank ataupun lembaga keuangan syariah non bank. Terbukti sejak didirikannya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan dan dinamika lembaga keuangan di Indonesia mencatat peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kualitas dari lembaga kebutuhan bisnis dan keuangan masa kini namun tetap dalam prinsip-prinsip Islam. Agar tetap mampu menjalankan perannya tersebut dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudannya dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintahan atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam.

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah untuk mendorong pihak yang kelebihan dana dan dimeminjamka kepada pihak yang

mengalami defisit atau kekurangan dana untuk kemudian dipakai dalam aktivitas ekonomi. Jadi lembaga keuangan syariah dapat menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan.¹ Munculnya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak di sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil, maka *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menjadi salah satu lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga diterapkan pada bank konvensional.²

Keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentaskan kemiskinan serta stabilitas sistem ekonomi.³ Pada dasarnya program keuangan inklusif ini sangatlah baik, karena memang pada dasarnya saat ini Indonesia masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk menikmati pelayanan jasa keuangan dari lembaga keuangan yang ada. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi masyarakat masih kurang merata atau masih banyak yang miskin. Dengan adanya

¹Haqiqi Rafsanjani & Rukhul Amin, "Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Majelis Taklim Aisyiyah Sinar Sakinah Mandiri)", *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2, 2017

² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publising, 2008) hlm. 23

³ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta:Bank Indonesia) hal. 4

keuangan inklusif diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka dengan memanfaatkan layanan jasa keuangan agar dapat mendukung permodalan kegiatan usaha mereka khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung dengan memberikan pembiayaan dan juga penghimpunan dana atau tabungan bagi masyarakat sekitar yang sulit menjangkau layanan jasa keuangan dari lembaga keuangan formal. Untuk memberikan pinjaman bagi masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan usaha BMT memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin, miskin produktif dan pekerja *migrant* menggunakan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Berikut ini tabel pembiayaan dari tahun 2015-2017.

Tabel 1.1

Perkembangan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada tahun 2015-2017 di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

No	Jenis pembiayaan	Jumlah pembiayaan		
		2015	2016	2017
1	Musyarakah	101.858.200	97.958.900	82.265.100
2	Mudharabah	108.204.100	113.869.100	122.205.700

Sumber : RAT BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui jumlah pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2015 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan, sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dari

tahun ke tahun jumlah pembiayaan yang dipinjamkan ke anggota mengalami kenaikan sampai saat ini Jadi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha dan melakukan peminjam di BMT Ummatan Wasathan kebanyakan menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menyatakan bahwa pengembangan usaha dilakukan terhadap usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengembangan usaha dapat meliputi fasilitas dan pelaksanaan pengembangan usaha. Pemerintah Pusat dan daerah memprioritaskan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai cara inilah yang akan membantu usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dan tumbuh sehingga kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dapat terasa dan terlihat.

Dorongan terhadap pengembangan dan pemberdayaan pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah sangat gencar dilakukan bahkan bisa disebut paling gencar sejak reformasi. Dari hasil program yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka perkembangan usaha mikro kecil dan menengah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan UMKM juga terjadi di Kabupaten Tulungagung, dimana perkembangan tersebut tersebar disejumlah wilayah Tulungagung yang meliputi 19 Kecamatan dimana semua UMKM tersebut berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya

pengembangan dan pemberdayaan diharapkan usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tulungagung bisa bersaing dengan usaha dari luar kota dan pendapatan yang terus naik dari tahun ke tahun semakin dirasakan oleh pemilik usaha di kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2015

No	Keterangan	Jumlah		
		2013	2014	2015
1	Usaha Kecil	8.291	8.469	8.492
2	Usaha Menengah	33	39	41
3	Usaha Besar	14	14	13
Jumlah		8.338	8.522	8.546

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan jumlah unit usaha pada tahun 2013-2015 di Kabupaten Tulungagung, dimana jumlah unit usaha kecil mengalami kenaikan, jumlah usaha menengah mengalami kenaikan, dan jumlah usaha besar mengalami penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah unit usaha, menengah dan besar pada tahun 2013-2015 mengalami pertumbuhan yang belum stabil karena pada setiap tahunnya tidak semuanya mengalami peningkatan justru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014-2015 tingkat pertumbuhannya menurun pada usaha skala besar.

Keuangan Inklusif merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, mengentaskan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyoar kelompok yang mengalami

hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyorot kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan hampir miskin) dan pekerja *migrant*. Berikut data orang miskin di Kabupaten Tulungagung 2014-2016.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten
Tulungagung tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	94.300	9,37
2013	91.300	9,03
2014	88.989	8,75
2015	87.370	8,57
2016	84.350	8,23

Sumber BPS Kab. Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.3 perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan secara signifikan. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2012-2016 penurunan terjadi yang mulanya presentase angka kemiskinan mencapai 9,37% turun menjadi 8,23%, jadi ada peningkatan kesejahteraan dan angka kemiskinan semakin menurun.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah. Alasannya kenapa memilih objek penelitian ini karena

berdasarkan pengamatan, bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya daerah jembatan Ngrowo berpenghasilan sebagai petani, pedagang kecil, warung kopi, usaha ternak, selain itu didaerah lain seperti di daerah Bontoran usaha konveksi, daerah Plosokandang pengrajin sapu atau keset, daerah Ngunut usaha seragam TNI dan lain sebagainya, sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam mengakses dan menikmati manfaat pelayanan dari lembaga keuangan syariah. Melihat fenomena yang terjadi tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan judul ”Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Ummatan Wasathan-Tulungagung”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan sudah mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan dalam rangka mengembangkan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung?
3. Apasaja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam meningkatkan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apakah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan sudah mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menjelaskan bagaimana peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ummatan Wasathan dalam rangka mengembangkan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam meningkatkan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung?

D. Batasan Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang kegiatan usahanya seperti bank syariah yaitu, meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan pembiayaan baik konsumtif maupun modal kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Agar penelitian ini lebih terarah dari topik yang dipersoalkan karena keterbatasan yang ada pada penulis dalam berbagai hal, maka penulis membatasi permasalahan ini pada peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Ummatan Wasathan-Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori berupa peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung di *Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan-Tulungagung*. serta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. Kajian keilmuan di bidang lembaga keuangan syariah
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di *Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan-Tulungagung*

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

- a. Bagi Akademik (IAIN Tulungagung)
Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung dan keilmuan
- b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (*Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan peran lembaga keuangan syariah dalam

mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Tulungagung peneliti yang akan datang

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Ummatan Wasathan Tulungagung.

F. Definisi Istilah

Untuk menyamai persepsi dan menghindari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah maka perlu adanya definisi istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁴

b. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau pendanaan balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil,

⁴ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter, 2010) hal 32

dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin.⁵

c. Keuangan Inklusi

Keuangan inklusif adalah hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.⁶

d. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut.⁷

2. Penegasan operasional

Peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah di *Baitul Maal Wat Tamwil* Ummatan Wasathan-Tulungagung adalah upaya pemerintah dalam membangun dan meningkatkan akses fasilitas layanan keuangan baik bersifat harga maupun non harga kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah, dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dari lembaga keuangan. Agar masyarakat dapat menjalankan usahanya

⁵ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 49

⁶ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif.....*, hal. 6

⁷ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: asnaliter 2006) hal 32

dengan mudah tanpa harus terkendala oleh sesuatu hal khususnya dalam hal permodalan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, maka dalam pembahasan ini diambil langkah-langkah sebagaimana sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal yang diambil meliputi perangkat legalitas skripsi, halaman sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama, terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pendahuluan yang meliputi, (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan, (d) batasan masalah, (e) kegunaan penelitian, (f) penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mendiskripsikan tentang pengertian maupun penjelasan mengenai (a) lembaga keuangan syariah, (b) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), (c) keuangan inklusif, (d) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumberdata, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran. Pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lamipran-lampiran, surat pernyataan seasian skripsi, dan daftar riwayat hidup